



LAPORAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

TAHUN 2018



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

KABUPATEN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Organisasi untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, 25 Januari 2019

Plt. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

The image shows a circular official stamp of the Regional Inspector of Morowali Utara. The stamp contains the text 'INSPEKTORAT DAERAH' and 'KABUPATEN MOROWALI UTARA'. A handwritten signature is written over the stamp.

ROMEL ERWIN TUNGKA, SPT
NIP.19730724 200012 1 003

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

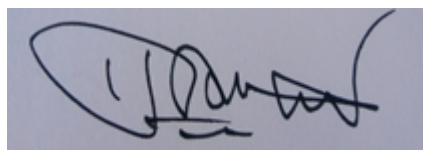
Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Bagian Organisasi kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Bagian Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, 25 Januari 2019

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,



YANISMAL BOTUALE, SE., MM

Pembina, IV/a

NIP. 19700106 199203 1 012

DAFTAR ISI

1.	VISI DAN MISI	
2.	PERNYATAAN TELAH DIREVIU	
3.	KATA PENGANTAR	i
4.	DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 LATAR BELAKANG	1
	1.2 GAMBARAN UMUM BAGIAN ORGANISASI.....	1
	1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA.....	2
	1.4 STRUKTUR BAGIAN ORGANISASI	3
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	4
	2.1 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.....	4
	2.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	4
	2.3 VISI DAN MISI BAGIAN ORGANISASI	5
	2.3.1 VISI.....	5
	2.3.2 MISI	5
	2.4 SASARAN DAN TUJUAN	5
	2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	6
	2.6 PERJANJIAN KINERJA.....	7
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
	3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.....	9
	3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017..	9
	3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	10
BAB IV	PENUTUP	13
	4.1 KESIMPULAN.....	13
	2.4 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Bagian Organisasi sebagai salah satu unit kerja berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, Bagian Organisasi mempunyai tugas fungsi melaksanakan , pengkajian rumusan, serta mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Organisasi Kelembagaan, analisa dan formasi jabatan serta ketatalaksanaan, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja Organisasi.

Untuk melaksanakan fungsi pokok tersebut diatas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggara pembinaan di bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dibidang pengorganisasian dan ketatalaksanaan;
- c. Pengendalian dan penyelenggaraan tugas dibidang organisasi dan ketatalaksanaan;

- d. Perumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan tugas dibidang organisasi dan ketatalaksanaan.

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Bagian Organisasi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
- c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Bagian Organisasi baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Masih belum memadainya Analisis Jabatan sehingga nantinya dalam pembentukan kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Organisasi masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen modern.
7. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bagian Organisasi.
9. Masih kurangnya tenaga staf organik pada Bagian Organisasi.

1.4 Struktur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah memiliki struktur organisasi dibawah Asisten Administrasi Umum terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian dan tiap-tiap Kepala Sub Bagian terdapat staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

BAGAN 1: STRUKTUR BAGIAN ORGANISASI



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 *Rencana Strategis Bagian Organisasi*

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
- c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
- e. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

2.2 *Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.*

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2017–2021, mempunyai Visi **"Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sejahtera dan beriman melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional "**.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Profesional.
2. Meningkatkan Infrastruktur Daerah dan Daya Dukung Lingkungan Secara Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Melalui Iklim Usaha yang KonPenataan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kesehatan.
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Yang Inklusif.
6. Mewujudkan Kerukunan dan Harmonisasi Kegamaan.
7. Mengentaskan Kemiskinan dari Pinggiran.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Organisasi terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

2.3 *Visi dan Misi Bagian Organisasi*

2.3.1 *Visi*

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan Bagian Organisasi sebagai salah satu instansi unsur staf Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Bagian Organisasi menetapkan visi **"Terwujudnya Pelayanan Prima di bidang organisasi dan ketatalaksanaan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur yang handal serta kelembagaan yang dinamis"**

2.3.2 *Misi*

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

- a. Menjadikan pelayanan administratif yang prima dalam memberikan pelayanan aparatur kepada seluruh perangkat pemerintahan;
- b. Meningkatkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan kinerja aparatur guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang tangguh, handal dan dinamis dalam rangka perwujudan penguatan kemandirian otonomi daerah;
- d. Melaksanakan analisis formasi jabatan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya menempatkan aparatur pada jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;

2.4 *Sasaran dan Tujuan Bagian Organisasi*

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi, maka Bagian Organisasi mempunyai tujuan :

1. Mewujudkan tertib administrasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan.
2. Terlaksananya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja sesuai dengan kebutuhan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam

rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan tertib administrasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas Administrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi - Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan - Terlaksananya Kompetensi Manajerial ASN - Tersusunnya LAKIP Pemerintah Daerah
2.	Terlaksananya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dan Tata Kerja sesuai dengan kebutuhan - Terwujudnya Prosedur Kerja dan Pelayanan Publik yang terstandarisasi

2.5 *Indikator Kinerja Utama Bagian Organisasi*

Bagian Organisasi Sekretariat menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel. 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAGIAN ORGANISASI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI IKU
1	Meningkatnya kualitas Administrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur 	Jumlah administrasi dan peralatan yang tersedia/jumlah administrasi dan peralatan yang ditargetkan X 100 %
2	Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur 	Jumlah Aparatur yang berkualitas/Jumlah Aparatur X 100%

3	Terlaksananya Kompetensi Manajerial ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase hasil anjab yang ditindaklanjuti - Persentase meningkatnya pemahaman aparatur pemda tentang standart kompetensi jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah hasil anjab yang ditindak lanjuti/ Jumlah hasil anjab X 100 - Jumlah aparatur pemda yang menduduki jabatan dan memahami tentang standart kompetensi jabatan / jumlah aparatur pemda yang menduduki jabatan X 100
4	Tersusunnya LAKIP Pemerintah Daerah	- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah LAKIP yang tersusun
5	Terlaksananya Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dan Tata Kerja sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pembentukan SKPD yang sesuai kemampuan dan Karakteristik Daerah. - Persentase perubahan SOTK dan Penjabaran Tugas dan Fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah OPD yang dibentuk sesuai kemampuan dan karakteristik daerah/Jumlah OPD yang dibentuk X 100%. - Jumlah SOTK dan Tusi yang dirubah/jumlah OPD X 100%.
6	Terwujudnya Prosedur Kerja dan Pelayanan Publik yang terstandarisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kualitas standar pelayanan publik dan SOP - Persentase kualitas standar pelayanan public (SPP) - Terlaksananya Work Shop SINOVIK 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SOP yang berkualitas (sesuai hasil evaluasi SPM) / Jumlah SOP X 100 - Jumlah SPP yang berkualitas(sesuai hasil evaluasi SPM)/Jumlah SPP X 100 - Terlaksananya kegiatan sosialisasi SINOVIK

2.6 Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2018

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Administrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur 	100% 100% 100%
2	Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	100%
3	Terlaksananya Kompetensi Manajerial ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase hasil anjab yang ditindaklanjuti. - Persentase meningkatnya pemahaman aparatur pemda tentang standart kompetensi jabatan. 	100% 100%

4	Tersusunnya LAKIP Pemerintah Daerah	- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%
5	Terlaksananya Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dan Tata Kerja sesuai dengan kebutuhan	- Persentase pembentukan SKPD yang sesuai kemampuan dan Karakteristik Daerah. - Persentase perubahan SOTK dan Penjabaran Tugas dan Fungsi	100% 100%
6	Terwujudnya Prosedur Kerja dan Pelayanan Publik yang terstandarisasi	- Persentase kualitas standar pelayanan publik dan SOP. - Persentase kualitas standar pelayanan public (SPP) - Terwujudnya kualitas pelayanan publik	100% (44 OPD) 100% (6 OPD) 50%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2018 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	FORMULASI IKU
1	Meningkatnya kualitas Administrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi	- Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	98	98%	Jumlah administrasi dan peralatan yang tersedia/jumlah administrasi dan peralatan yang ditargetkan X 100 %
		- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100%	94	94%	
		- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur	100%	100	100%	

2	Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan	- bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan	100%	96	96%	Jumlah Aparatur yang berkualitas/Jumlah Aparatur X 100%
3	Terlaksananya Kompetensi Manajerial ASN	- Persentase hasil anjab yang ditindak lanjuti	100%	100	100%	- Jumlah hasil anjab yang ditindak lanjuti/ Jumlah hasil anjab X 100
		- Persentase meningkatnya pemahaman aparatur pemda tentang standart kompetensi jabatan	100%	100	100%	- Jumlah aparatur pemda yang menduduki jabatan dan memahami tentang standart kompetensi jabatan / jumlah aparatur pemda yang menduduki jabatan X 100
4	Tersusunnya LAKIP Pemerintah Daerah	- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%	100	100%	- Jumlah LAKIP yang tersusun
5	Terlaksananya Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dan Tata Kerja sesuai dengan kebutuhan	- Persentase pembentukan OPD yang sesuai kemampuan dan Karakteristik Daerah	100%	100	1%	- Jumlah OPD yang dibentuk sesuai kemampuan dan karakteristik daerah/Jumlah OPD yang dibentuk X 100
		- Persentase perubahan SOTK dan Penjabaran Tugas dan Fungsi	100%	100	100%	- Jumlah SOTK dan Tusi yang dirubah/jumlah OPD X 100%
6	Terwujudnya Prosedur Kerja dan Pelayanan Publik yang terstandarisasi	- Persentase kualitas standar Operasional Prosedur (SOP)	100% (44 OPD)	30	68%	- Jumlah SOP yang berkualitas(sesuai hasil evaluasi SPM)/Jumlah SOP X 100
		- Persentase kualitas standar pelayanan public (SPP)	100% (6 OPD)	100	100%	- Jumlah SPP yang berkualitas(sesuai hasil evaluasi SPM)/Jumlah SPP X 100
		- Terwujudnya kualitas pelayanan public	50%	100	100%	- Terlaksananya kegiatan sosialisasi

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Bagian Organisasi dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2017-2021. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Bagian Organisasi adalah sebanyak 6 (enam) sasaran. Pada tahun 2018 ditetapkan 6 sasaran strategis dengan 12 (duabelas) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi tahun 2018.

Dari 6 sasaran strategis dengan 12 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤	12	Sangat Baik
2	76≤90		Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	12	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: 25
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91≥	76≥ 90	66≥ 75	51≥ 65	≤50
1.	- Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	98	98%	✓				
	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100%	94	94%	✓				
	- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur	100%	100	100%	✓				
	CAPAIAN RATA-RATA				97%	✓			
2.	- bimbingan teknis penerapan Undang-Perundang-	100%	96	96%					

	CAPAIAN RATA-RATA			96%	✓				
3.	- Persentase hasil anjab yang ditindak lanjuti	100%	100	100%	✓				
	- Persentase meningkatnya pemahaman aparatur pemda tentang standart kompetensi jabatan	100%	100	100%	✓				
	CAPAIAN RATA-RATA			100%	✓				
4.	- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%	100	100%	✓				
	CAPAIAN RATA-RATA			100%	✓				
5.	- Persentase pembentukan SKPD yang sesuai kemampuan dan Karakteristik Daerah	100%	100	100%	✓				
	- Persentase perubahan SOTK dan Penjabaran Tugas dan Fungsi	100%	100	100%	✓				
	CAPAIAN RATA-RATA			100%	✓				
6.	- Persentase kualitas standar Oeperasional Prosedur (SOP)	100% (44 OPD)	30	68%	✓				
	- Persentase kualitas standar pelayanan public (SPP)	100% (6 OPD)	100	100%	✓				
	- Terwujudnya kualitas pelayanan public	50%	100	100%	✓				
	CAPAIAN RATA-RATA			89%	✓				

✓ Gambaran pencapaian kinerja dari (Lima Puluh Delapan) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Kesatu Meningkatnya kualitas Administrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi.

Sasaran kesatu Meningkatnya kualitas Administrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi. dapat dilihat dari indikator yaitu; Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia, Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur , pada Tahun 2018, dengan pencapaian kinerja rata-rata 97 % dengan predikat Sangat Baik.

2. Sasaran Kedua Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan

Sasaran kedua Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan dapat dilihat dari 7 indikator yaitu; bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan, pada tahun 2018, dengan pencapaian kinerja rata-rata 96 % dengan predikat Sangat Baik.

3. Sasaran Ketiga Terlaksananya Kompetensi Manajerial ASN.

Sasaran ketiga Terlaksananya Kompetensi Manajerial ASN dapat dilihat dari 2 indikator, yaitu; Persentase hasil anjab yang ditindak lanjuti, Persentase meningkatnya pemahaman aparatur pemda tentang standart kompetensi jabatan pada tahun 2018, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat Sangat Baik.

4. Sasaran Keempat Tersusunnya LAKIP Pemerintah Daerah.

Sasaran ketiga Tersusunnya LAKIP Pemerintah Daerah yaitu; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2018, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat Sangat Baik.

5. Sasaran Kelima Terlaksananya Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dan Tata Kerja sesuai dengan kebutuhan

Sasaran kelima Terlaksananya Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dan Tata Kerja sesuai dengan kebutuhan dapat dilihat dari 2 indikator yaitu ; Persentase pembentukan SKPD yang sesuai kemampuan dan Karakteristik Daerah, Persentase perubahan SOTK dan Penjabaran Tugas dan Fungsi, pada tahun 2018, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100 % dengan predikat Sangat Baik.

6. Sasaran Keenam Terwujudnya Prosedur Kerja dan Pelayanan Publik yang terstandarisasi.

Sasaran keenam Terwujudnya Prosedur Kerja dan Pelayanan Publik yang terstandarisasi, dapat dilihat dari 3 indikator yaitu; Persentase kualitas standar Oeperasional Prosedur (SOP), Persentase kualitas standar pelayanan public (SPP), Terwujudnya kualitas pelayanan public, pada tahun 2018 dengan pencapaian kinerja rata-rata 89 % dengan predikat Sangat Baik.

6. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 - 2018.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2017-2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2017	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%)
1	Meningkatnya kualitas Administrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi	- Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	80%	98	98%
		- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	85%	85%	94	94%

		- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur	75%	88,23%	100	100%
2	Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan	- bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan	100%	100%	96	96%
3	Terlaksananya Kompetensi Manajerial ASN	- Persentase hasil anjab yang ditindak lanjuti	100%	100%	100	100%
		- Persentase meningkatnya pemahaman aparatur pemda tentang standart kompetensi jabatan	100%	100%	100	100%
4	Tersusunnya LAKIP Pemerintah Daerah	- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%	100%	100	100%
5	Terlaksananya Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dan Tata Kerja sesuai dengan kebutuhan	- Persentase pembentukan OPD yang sesuai kemampuan dan Karakteristik Daerah	90%	90%	100	100%
		- Persentase perubahan SOTK dan Penjabaran Tugas dan Fungsi	90%	90%	100	100%
6	Terwujudnya Prosedur Kerja dan Pelayanan Publik yang terstandarisasi	- Persentase kualitas standar Oeperasional Prosedur (SOP)	100%	100%	35	80%
		- Persentase kualitas standar pelayanan public (SPP)	50%	50%	100	100%
		- Persentase Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Minimal			100	100%
		- Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik	100%	100%	100	100%

1. Meningkatnya kualitas Administrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi.

Dari tabel diatas pada sasaran meningkatnya kualitas administrasi perkantoran dapat dengan tiga indicator yaitu; Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia, Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja pada indikator Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran tercatat sebesar 80% dengan capaian kinerjanya 80%, indikator Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia 85% dengan capaian kinerjanya 85%, indikator Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur 75% dengan capaian 88,23%, kemudian ketiga indikator tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar antara lain: indikator Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran tercatat sebesar 98% dengan capaian kinerjanya 98%, indikator Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia 94% dengan capaian kinerjanya 94%, indicator Peningkatan

Kemampuan Sumber Daya Aparatur 100% dengan capaian 100%. Peningkatan ini terjadi disebabkan bahwa pada tahun 2017 Bagian Organisasi merupakan perangkat daerah yang baru terbentuk dan memiliki Anggaran yang sangat minim sebesar Rp 853.908.400 sehingga untuk menunjang kinerja pada program tersebut tidak maksimal, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kinerja pada program tersebut karena ditunjang dengan jumlah anggaran cukup maksimal sebesar Rp. 1.829.393.398.-

2. Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan

Dari tabel diatas pada sasaran meningkatnya kualitas administrasi perkantoran dengan indikator yaitu; penerapan Perundang-Undangan, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas, Tahun 2017 realisasi kinerja pada indikator penerapan Perundang-Undangan tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% pula pada indikator ini realisasi dan capaian kinerja sesuai target yang direncanakan. Pada tahun 2018 realisasi kinerja pada indikator penerapan Perundang-Undangan tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% pula. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai apa yang diharapkan karena merupakan perangkat daerah baru maka kegiatan ini sangat diupayakan dalam pembinaan aparatur pada pada perangkat daerah yang baru dibentuk.

3. Terlaksananya Kompetensi Manajerial ASN

Dari tabel diatas pada sasaran Terlaksananya Kompetensi Manajerial ASN dengan 2 (dua) indikator yaitu; persentase hasil anjab yang ditindak lanjuti, Persentase meningkatnya pemahaman aparatur pemda tentang standart kompetensi jabatan realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas, Tahun 2017 realisasi kinerja pada indikator persentase hasil anjab yang ditindak lanjuti tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja pada indikator Persentase meningkatnya pemahaman aparatur pemda tentang standart kompetensi jabatan tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% pula pada kedua indikator ini realisasi dan capaian kinerja sesuai target yang direncanakan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 realisasi kinerja pada indikator persentase hasil anjab yang ditindak lanjuti tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja pada indikator Persentase meningkatnya pemahaman aparatur pemda tentang standart kompetensi jabatan tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% pula pada kedua indikator ini realisasi dan capaian kinerja sesuai target yang direncanakan pada tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai apa yang diharapkan karena merupakan perangkat daerah baru maka kegiatan ini sangat diupayakan dalam pembinaan aparatur dalam memahami tentang penilaian hasil ANJAB dan ABK serta meningkatkan pemahaman aparatur pemda tentang standart kompetensi jabatan.

4. Tersusunnya LAKIP Pemerintah Daerah

Dari tabel diatas pada sasaran Tersusunnya LAKIP Pemerintah Daerah dengan indikator yaitu; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, realisasi dan capaian

kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas, Tahun 2017 realisasi kinerja pada indikator Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% pula pada indikator ini realisasi dan capaian kinerja sesuai target yang direncanakan pada tahun 2017. Sedangkan Pada tahun 2018 realisasi kinerja pada indikator Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% pula pada indikator ini realisasi dan capaian kinerja sesuai target yang direncanakan pada tahun 2018, kegiatan ini dilaksanakan sesuai apa yang diharapkan karena pada kegiatan ini terlihat dari data masing-masing OPD telah membuat Laporan Kinerja sehingga dari LAKIP masing-masing OPD dapat digunakan sebagai data sampel untuk memudahkan Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah.

5. Terlaksananya Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dan Tata Kerja sesuai dengan kebutuhan.

Dari tabel diatas pada sasaran Terlaksananya Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dan Tata Kerja sesuai dengan kebutuhan dengan 2 (dua) indikator yaitu; Persentase pembentukan SKPD yang sesuai kemampuan dan Karakteristik Daerah, Persentase perubahan SOTK dan Penjabaran Tugas dan Fungsi, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas, Tahun 2017 realisasi kinerja pada indikator Persentase pembentukan OPD yang sesuai kemampuan dan Karakteristik Daerah tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja pada indikator Persentase perubahan SOTK dan Penjabaran Tugas dan Fungsi tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% pula pada kedua indikator ini realisasi dan capaian kinerja sesuai target yang direncanakan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 realisasi kinerja pada indikator Persentase pembentukan OPD yang sesuai kemampuan dan Karakteristik Daerah tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi kinerja pada indikator Persentase perubahan SOTK dan Penjabaran Tugas dan Fungsi tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% pula kegiatan ini dilaksanakan sesuai apa yang diharapkan karena pada kegiatan ini terlihat dari data jumlah OPD yang telah terbentuk dan OPD yang mengalami perubahan Susunan Perangkat Daerah, perubahan SOTK dan penjabaran tugas dan fungsi masing-masing OPD.

6. Terwujudnya Prosedur Kerja dan Pelayanan Publik yang terstandarisasi

Dari tabel diatas pada sasaran Terwujudnya Prosedur Kerja dan Pelayanan Publik yang terstandarisasi dengan tiga indikator yaitu; Persentase kualitas standar Operasional Prosedur (SOP), Persentase kualitas standar pelayanan public (SPP), Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2017 realisasi kinerja pada indikator Persentase kualitas standar Operasional Prosedur (SOP) tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%, realisasi kinerja pada indikator Jumlah Persentase kualitas standar pelayanan public (SPP) tercatat sebesar 50% dengan capaian kinerjanya 50%, realisasi kinerja pada indikator Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, kemudian ketiga indikator tersebut mengalami

peningkatan pada tahun 2018 sebesar antara lain: Tahun 2017 realisasi kinerja pada indikator Persentase kualitas standar Operasional Prosedur (SOP) tercatat sebesar 100% dengan capaian kerjanya 100%, realisasi kinerja pada indikator Jumlah Persentase kualitas standar pelayanan publik (SPP) tercatat sebesar 100% dengan capaian kerjanya 100%, realisasi kinerja pada indikator Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Peningkatan ini terjadi disebabkan bahwa pada tahun 2018 Bagian Organisasi mengalami peningkatan kinerja pada program tersebut dengan melakukan pembinaan ASN serta melakukan monitoring dan evaluasi jumlah data OPD yang menyusun SOP dan SPM serta memberikan pelayanan masyarakat.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2017-2021 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Organisasi periode Tahun 2018 memaparkan capaian kinerja Bagian Organisasi dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 7
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1 TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya kualitas Administrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi	- Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	98	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	178.822.160	174.602.500	98%
		- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100%	94		160.464.00	158.988.200	94%
		- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur	100%	100		393.971.259	393.484.800	100%
2	Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	100%	96	Program peningkatan Sumber Daya Aparatur	137.345,599	137.345.599	100%
3	Terlaksananya Kompetensi Manajerial ASN	- Terukurnya Jumlah Jabatan dan Formasi disetiap OPD	100%	100	Program Penyusunan ANJAB dan ABK	83.580.000	78.984.500	95%
		- Persentase meningkatnya pemahaman aparatur pemda tentang standart kompetensi jabatan	100%	100		84.400.000	77.524.000	92%
4	Tersusunnya LAKIP Pemerintah Daerah	- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi	100%	100	Program SAKIP /LAKIP Pemda	231.147,000	132.906.450	57%

		Pemerintah						
5	Terlaksananya Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dan Tata Kerja sesuai dengan kebutuhan	- Persentase pembentukan OPD yang sesuai kemampuan dan Karakteristik Daerah	100%	100	Program evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah	127,614,000	122,665.000	96,00%
		- Persentase perubahan SOTK dan Penjabaran Tugas dan Fungsi	100%	100		111.343.180	108.870.000	98%
6	Terwujudnya Prosedur Kerja dan Pelayanan Publik yang terstandarisasi	- Persentase kualitas standar Oeperasional Prosedur (SOP)	100% (44 OPD)	30	Program Tatalaksana Pelayanan Publik	117.065.200	74.757.400	64%
		- Persentase kualitas standar pelayanan public (SPP)	100% (6 OPD)	100		75.598.000	67.981.000	90%
		- Terwujudnya kualitas pelayanan public	50%	100		128.043.000	114.896.700	90%

BAB IV

KESIMPULAN PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2017-2021, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena dari 6 sasaran yang terdiri dari 13 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sangat baik

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

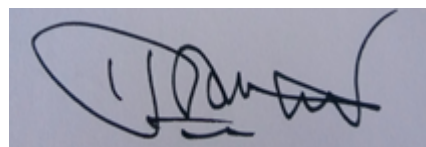
- 1) Mengoptimalkan peran Bagian Organisasi dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 25 Januari 2019

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,



YANISMAL BOTUALE, SE., MM

NIP. 19700106 199203 1 012